**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PROSESI MANDOA
PERDAMAIAN DI DESA KETAPING JAYA KECAMATAN INUMAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

Oleh: Jodi Saputra

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing1 : Dr.Mukhlis.R, S.H., M.H

Pembimbing 2: Ferawati,S.H., M.H

**Alamat: Jalan Garuda Sakti KM 1, Gg Kampar, Kelurahan Simpang Baru,
Kecamatan Tampan, Pekanbaru**

Email/Telepon : saputrajodi2000@gmail.com/082261312339

ABSTRACT

This research is related to the settlement of criminal acts of persecution through a peace prayer procession in Ketaping Jaya Village, Inuman District, Kuantan Singingi Regency. Settlement of problems between perpetrators and victims of criminal acts of persecution is not only resolved in the criminal justice system as a formal settlement, but in the community the settlement through customary law, namely the peace prayer procession, can be a solution or way of resolving criminal acts of persecution. Therefore it is necessary to study, first, the process of resolving the crime of persecution through a peace prayer procession, as well as the impact of this settlement on the level of crime in Ketaping Jaya Village, Inuman District, Kuantan Singingi Regency, secondly the influence of the mechanism for solving the crime of persecution through the peace prayer process on recidivists in reducing/preventing criminal acts of persecution.

This research is a sociological law research, because it is based on field research, namely by collecting data from observation, interviews, and literature studies that have to do with problems using qualitative data analysis, producing descriptive data, and concluded with a deductive thinking method.

From the results of the study, it was concluded that, first, the settlement of the crime of persecution through a peace prayer procession in Ketaping Jaya Village, Inuman District was effective, because the settlement had a positive impact on reducing crime rates in Ketaping Jaya Village. However, there are still weaknesses, namely the settlement process takes quite a long time because the parties involved, especially the ninik mamak of both parties, can delay the predetermined settlement time for personal reasons and unilaterally. Second, the completion of the crime of persecution through the peace prayer procession greatly influences the recidivist in reducing or preventing the crime of persecution. In addition, this settlement also affected the behavior of the perpetrators and the surrounding community, which became better than before due to fear of sanctions, be it fines or social sanctions.

Keywords: Customary Law-Persecution-Prayer for Peace-Recidivist

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.¹ Sedangkan tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel, Tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Kejahatan yang dimuat dalam Buku II salah satunya ialah kejahatan terhadap tubuh yang diatur dalam Bab XX mulai dari Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP tentang Penganiayaan. Sedangkan dalam RKUHP, tindak pidana penganiayaan terdapat pada Bab XXII tindak pidana terhadap tubuh bagian kesatu penganiayaan dimulai dari pasal 470 RKUHP sampai dengan pasal 475 RKUHP.² Pengertian mengenai penganiayaan tidak diatur secara tegas didalam undang-undang, sehingga untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penganiayaan para ahli hukum memberikan pendapatnya menurut hasil pemikirannya mengenai penganiayaan. Menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Satochid Kertanegara,

penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.³ Dengan pengertian penganiayaan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau merusak kesehatan dengan maksud atau tujuan yang dibenarkan oleh hukum tidak dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan.⁴

Keberlakuan hukum adat didalam sumber hukum di Indonesia telah diatur secara resmi yang merujuk pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945⁵ dimana menyebutkan “negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Konstitusi dari pasal ini di ciptakan atas dasar kemajemukan bangsa Indonesia yang memiliki ragam suku bangsa, budaya, dan bahasa. Menurut Mr. Van Vollenhoven pengertian hukum adat mengandung makna bahwa hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat adalah merupakan hukum adat, karena hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat.⁶

Penegakan hukum pidana di Indonesia dalam praktiknya sering diselesaikan diluar proses pengadilan yaitu melalui mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Mandoa perdamaian adalah salah satu contoh penyelesaian perkara dibidang hukum pidana yang dilakukan melalui aplikasi hukum adat, yaitu penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Mandoa Perdamaian adalah suatu proses penyelesaian permasalahan melalui proses perundingan para pihak, yaitu pihak korban, pihak pelaku dan ninik mamak dari kedua bela pihak berkumpul dirumah korban untuk

¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 6-7.

²https://bphn.go.id/data/documents/draft_ruu_kuhp_final.pdf diakses Pada Tanggal 08 Maret 2023, Pukul 16.55 WIB.

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010, hlm. 10.

⁴ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, Malang, 2001, hlm. 37-39.

⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2)

⁶ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perilaku*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm.43.

memusyawarahkan permasalahan yang terjadi, diawali dengan penyampaian kronologi kejadian dari pelaku dan juga korban serta saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Dalam prosesi tersebut akan disampaikan sanksi terhadap pelaku dan hal-hal lain yang sudah disepakati oleh ninik mamak kedua belah pihak, serta diakhiri dengan acara makan bersama dan maaf-maafan dari semua pihak yang terlibat dalam kasus tindak penganiayaan tersebut.⁷ Hal ini tentu adanya perbedaan antara hukum positif dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dari uraian permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Prosesi Mandoa Perdamaian Di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi**”

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada proposal penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui prosesi mandoa perdamaian, serta bagaimana dampak dari penyelesaian tersebut terhadap tingkat kejahatan Di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Sejauhmana pengaruh mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui prosesi mandoa perdamaian terhadap residivis dalam mengurangi/ mencegah tindak pidana penganiayaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui prosesi mandoa perdamaian dan mengetahui dampak dari penyelesaian tersebut terhadap tingkat kejahatan Di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui prosesi

mandoa perdamaian terhadap residivis dalam mengurangi/ mencegah tindak pidana penganiayaan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau;
- b. Untuk Sumbangan Penelitian yang relevan dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana khususnya mengenai penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui jalur adat (non-litigasi);
- c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap masalah yang diteliti, yakni penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui prosesi mandoa perdamaian Di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Karangka Teori

1. Teori Restorative Justice

James Dignan dalam karyanya *Understanding Victims and Restorative Justice* (2005) mengungkapkan istilah keadilan restoratif berawal ketika Albert Eglash (1977) berupaya membedakan tiga bentuk peradilan pidana, yakni retributive justice, distributive justice, dan restorative justice. Menurut Eglash, sasaran keadilan retributif adalah penghukuman terhadap pelaku atas kejahatan yang dilakukan. Adapun sasaran keadilan distributif adalah rehabilitasi para pelaku kejahatan. Sementara itu, keadilan restoratif merupakan prinsip restitusi dengan melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.

Pendekatan dengan keadilan restoratif menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁸ Konsep keadilan restoratif lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian. Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu

⁷ Wawancara Dengan Bapak Hasrat, Ninik Mamak Suku Kotorona, Hari Minggu, Tanggal 15 Mei 2022, Bertempat Kediaman Bapak Hasrat Desa Ketaping Jaya.

⁸ Henny Said, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik*, No.2, Vol III, Oktober 2018, hlm.146, diakses melalui <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/6899> pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 15.25 WIB.

pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. berbeda dengan pendekatan yang di pakai dalam konvensional atau litigasi, pendekatan ini mementingkan kepada perdamaian dan kesepakatan kedua belah pihak dalam menyelesaikan tindak pidana⁹.

Menurut pandangan konsep *restorative justice* penanganan kasus kriminal tanggung jawab tidak hanya dari negara atau aparat polisi saja tetapi juga dari masyarakat, oleh karena itu konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus di pulihkan kembali baik kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian yang di tanggung oleh masyarakat.¹⁰

Restorative justice timbul akibat kurang suatu sistem peradilan pidana tidak sesuai dengan apa yang di harapkan dalam mencari dan untuk menjamin suatu keadilan, karena apabila tindak pidana ringan yang di selesaikan dalam sistem peradilan pidana tidak menjadi indikator kepuasan antara pelaku dan korban. Maka dari itu timbullah suatu kebutuhan yaitu proses yang di selesaikan antara pelaku dan pihak korban, dimana pelaku dan korban bisa mencari jalan keluar nya sendiri sesuai keinginan masing-masing.

Sistem peradilan pidana saat ini cenderung hanya memperhatikan hak-hak pelaku, namun terhadap hak-hak korban kurang mendapat perhatian, sehingga hukum pidana terkesan lebih memberikan perlindungan hak-hak pelaku. Namun yang harus di mengerti adalah dalam menegakkan suatu hukum pidana saat ini, suatu aturan memang harus didukung dengan adanya suatu sanksi pidana,

tetapi juga harus diingat bahwa sanksi pidana adalah suatu *Ultimum Remedium* yaitu sebagai upaya terakhir dalam proses penyelesaiannya, apabila sanksi hukum yang lain belum mampu menjaga norma hukum yang ada, guna mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat.¹¹

2. Teori *Reception a Contrario*

Teori ini adalah pengembangan ajaran Prof Hazairin, teori *receptie exit*. Ia menulis buku *Receptie A Contrario : Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, buku ini mengungkapkan bahwa perkembangan hukum Islam dari segi politik hukum penjajah Belanda selama di Indonesia sehingga menghasilkan teori *receptie*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sayuti Thalib dalam buku menyebutkan bahwa

- a. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam
- b. Hal tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya.
- c. Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.¹²

Dalam teori ini, hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pada dasarnya, bagi orang Islam berlaku hukum Islam dan hukum adat hanya berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan kesadaran batin dan cita-cita hukum Islam. Landasan berpikir Sayuti Thalib mengemukakan teori ini adalah didasarkan pada pemikiran bahwa di negara Republik Indonesia yang merdeka, sesuai dengan cita-cita batin, cita-cita moral, dan kesadaran hukum kemerdekaan, berarti ada keleluasaan untuk mengamalkan ajaran agama dan hukum agama.

Dalam teori *receptie* melihat kedudukan hukum adat lebih didahulukan daripada hukum Islam, tetapi dalam teori *receptie a contrario* menundukkan hukum adat pada posisi kebalikannya, yaitu kedudukan hukum Islamlah yang lebih didahulukan daripada hukum adat. Sayuti Thalib dalam mengemukakan rumusan

⁹ Yuni Amdani, "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh", Dikutip Dari *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra-Langsa Aceh*, 2012 diakses melalui <https://www.neliti.com.id>, hlm. 64.

¹⁰ Hanafi Arief, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan*, 2009, diakses melalui <https://media.neliti.com>, hlm. 7.

¹¹ Gede Widhianata Suarda, *Hukum Pidana, Materi Penghapusan, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Cetakan Kedua, Bayu Media Publishing, Malang, 2012, hlm. 11.

¹² Sajuti Thalib, *Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 69.

teori *receptie a contrario* didasarkan pada kaidah-kaidah sebagai berikut;

- a. Pada prinsipnya dalam kaitannya dengan perintah Tuhan dan Rasul adalah wajib
- b. Larangan pada dasarnya adalah ketidakbolehan untuk dikerjakan (haram)
- c. Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dari paparan di atas, teori ini lebih mendahulukan hukum Islam dalam kedudukannya di dasarkan pada A-Qur'an dan Sunnah, jadi bagi masyarakat Islam berlaku hukum Islam yang berprinsip bahwa keyakinan agama dan keyakinan hukum merupakan kelanjutan dari keyakinan Tuhan dalam hukum Islam.¹³

E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak.¹⁴ Agar dapat diperoleh pemahaman dan persepsi yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep yang digunakan dalam tulisan ini, maka di bawah ini akan disajikan penjelasan tentang konsep-konsep ataupun peristilahan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penyelesaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai.¹⁵
2. Tindak Pidana, terdapat ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu :
 - a. Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata

hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

- b. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.
3. Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹⁷
 4. Sanksi adalah akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau makhluk sosial) atau suatu perbuatan.¹⁸
 5. Prosesi *mandoa perdamaian* adalah suatu proses penyelesaian permasalahan melalui proses perundingan para pihak, yaitu pihak korban, pihak pelaku dan *minik mamak* dari kedua belah pihak berkumpul di rumah korban untuk memusyawarahkan permasalahan yang terjadi, diawali dengan penyampaian kronologi kejadian dari pelaku dan juga korban serta saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Dalam proses tersebut akan disampaikan sanksi terhadap pelaku dan hal-hal lain yang sudah disepakati oleh *minik mamak* kedua belah pihak, serta diakhiri dengan acara makan bersama dan maaf- maafan dari semua pihak yang terlibat dalam kasus tindak penganiayaan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Dalam hal ini penelitian hukum sosiologis berguna untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*) karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada

¹³ Rahmat Rosyadi dan M Rais Ahmad. *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif tata Hukum Indonesia*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal. 87.

¹⁴ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Depok, Rajawali Pers, 2017, hlm. 14.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁶ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995, hal. 225.

¹⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

¹⁸ *Kamus Hukum*, (Jakarta: Citra Umbara, 2008), hlm. 429.

dibalik pelaksanaan penegakan hukum.¹⁹ Sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah Kabupaten Kuantan Singingi. Yaitu tepatnya di desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman. dengan alasan selain mempersempit lokasi penelitian juga berdasarkan pra penelitian didapati beberapa kasus tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui hukum adat setempat yaitu prosesi mandoa perdamaian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi merupakan sekelompok orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁰ Adapun populasi penelitian adalah :

- 1) Kepala Desa Ketaping Jaya
- 2) Ninik Mamak Desa Ketaping Jaya
- 3) Pelaku
- 4) Korban
- 5) Masyarakat.

b. Sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang di anggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, dalam penetapan sampel, penulis menggunakan metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili sejumlah populasi yang ada.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil wawancara kepada sampel yang telah ditetapkan seperti yang ada di tabel. Adapun responden yang telah ditetapkan tersebut adalah Kepala Desa Ketaping Jaya, Ninik Mamak Desa Ketaping Jaya, Pelaku, korban, dan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data yang ada dibuku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perustakaan berasal:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- g) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- h) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum adat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, berupa hasil-hasil penelitian, buku-buku, kajian atau riset ilmiah, pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian; dan berbagai makalah, jurnal, data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus besar bahasa Indonesia,

¹⁹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 134.

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 72.

kamus-kamus hukum, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Observasi, yaitu pengamatan lapangan yang peneliti lakukan berkaitan dengan objek/lokasi penelitian.²¹
- b. Wawancara, peneliti melakukan wawancara langsung kepada sampel. Sampel yang dimaksud adalah Kepala Desa Ketaping Jaya, Ninik Mamak Desa Ketaping Jaya, pelaku, dan korban.
- c. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan yang telah tersedia alternatif jawabannya kepada sampel, yaitu, Masyarakat yang berada di Desa Ketaping Jaya.
- d. Kajian Pustaka, yaitu pengumpulan data melalui literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan masalah yang sedang diangkat oleh peneliti.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Penelitian ini nantinya akan dianalisis dengan cara kualitatif, yakni menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh Peneliti. Setelah dianalisis dalam menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian, peneliti menggunakan metode berfikir secara deduktif yakni cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau detail yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pidana

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

²¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, hlm.11.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²²Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.²³

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud dari sudut pandang teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut pandang Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.²⁴

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:²⁵

1) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku. Unsur objektif tindak pidana meliputi:

- a) Sifat melawan hukum;
- b) Kualitas si pelaku;

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78.

²⁵ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 56.

- c) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subjektif tindak pidana meliputi:

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- c) Ada atau tidaknya perencanaan;

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Adapun jenis-jenis tindak pidana adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Kejahatan (*Misdrijven*) dan Pelanggaran (*overtredingen*)
- 2) Delik Formil dan Delik Materil
- 3) Delik *Commissiois* dan Delik *Omissionis*
- 4) Delik Kesengajaan (*dolus*) dan Delik Kealpaan (*culpa*)
- 5) Delik Aduan (*klacht delicten*) dan Delik Biasa

2. Tinjauan Umum Tentang Pidana

a. Pengertian Pidana

Pidana merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.²⁷

Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat

dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan diatas bisa disimpulkan bahwa pidana ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

b. Teori Pidana

Teori pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

- 1) Teori Pembalasan
- 2) Teori Tujuan
- 3) Teori Gabungan

c. Jenis-Jenis Pidana

Berdasarkan ketentuan yang ada di pasal 10 KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pidana hanya terdapat dua macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.²⁸ Pidana Pokok yang terdiri dari:

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda
- 5) Pidana Tutupan

Pidana Tambahan yang terdiri dari:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu.
- 3) Pengumuman putusan hakim.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Mr. M. H. Tirtamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.²⁹

²⁶ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hlm 44.

²⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hlm. 25.

²⁸ M Najih SH, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm.177.

²⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

- a. Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP
- b. Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP
- c. Penganiayaan Berencana Pasal 353 KUHP
- d. Penganiayaan Berat Pasal 354 KUHP
- e. Penganiayaan Berat Berencana Pasal 355 KUHP

C. Tinjauan Umum Tentang Mandoa Perdamaian

1. Pengertian Mandoa Perdamaian

Mandoa Perdamaian adalah suatu proses penyelesaian permasalahan melalui proses perundingan para pihak, yaitu pihak korban, pihak pelaku dan ninik mamak dari kedua belah pihak berkumpul dirumah korban untuk memusyawarahkan permasalahan yang terjadi, diawali dengan penyampaian kronologi kejadian dari pelaku dan juga korban serta saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Dalam prosesi tersebut akan disampaikan sanksi terhadap pelaku dan hal-hal lain yang sudah disepakati oleh ninik mamak kedua belah pihak, serta diakhiri dengan acara makan bersama dan maaf-maafan dari semua pihak yang terlibat dalam kasus tindak penganiayaan tersebut.³⁰ Pendapat lain menjelaskan bahwasanya mandoa perdamaian adalah suatu acara pengambilan keputusan baik itu sanksi terhadap pelaku dan keputusan-keputusan lain yang

berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan.³¹

2. Pihak-Pihak Terkait dalam Prosesi Mandoa Perdamaian

Para pihak yang terkait atau terlibat dalam prosesi mandoa perdamaian antara lain:

- a. Pelaku
- b. Korban
- c. Ninik mamak pihak pelaku
- d. Ninik mamak pihak korban
- e. Saksi yang melihat
- f. Kepala desa
- g. Tokoh masyarakat.

3. Tugas Pokok dan Tanggung jawab Pemangku Adat

- a. Membimbing, membina, mengarahkan anak cucu kemenakan dalam setiap jajaran suku yang ada menuju kepada tingkah laku dan perilaku yang sehat dalam setiap tatanan hidup dan kehidupan yang berlaku di tengah masyarakat. Selanjutnya mewariskan adat kepada anak cucu kemenakan sebagai kader dan generasi penerus adat yaitu *adat lamo pisako usang, indak lapuak dek hujan, indak lokang dek paneh; nan lah lusuah nan mamakai, nan lah pasa dek manuruik, Yaitu adat yang bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah.*
- b. Memegang resiko dan keberatam serta mempertanggungjawabkan segala pelanggaran dari tingkah laku, perilaku anak cucu kemenakan sepanjang jalan adat. Mamak di pintu utang, kemenakan di pintu mati, *Kaluak paku kacang balimbing, Ambiak tampurung lenggang-lenggangkan, Bao manurun ka Saruaso, Anak dipangku kemanakan di bimbing, Urang kampung dipatenggangkan, Supayo aman sentoso.*

³⁰Wawancara Dengan Bapak Hasrat, Ninik Mamak Suku Kotorona, Hari Minggu, Tanggal 15 Mei 2022, Bertempat Kediaman Bapak Hasrat Desa Ketaping Jaya.

³¹ Wawancara Dengan Bapak Firdaus, Tokoh Adat Desa Ketaping Jaya, Hari Jum'at, Tanggal 17 Juni 2022, Bertempat Kediaman Bapak Hasrat Desa Ketaping Jaya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Prosesi Mandoa Perdamaian, serta Dampak dari Penyelesaian Terhadap Tingkat Kejahatan Di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

Lembaga adat di Kabupaten Kuantan Singingi berada dibawah naungan Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Kuansing.³² Setiap desa memiliki pemangku adat yang dikukuhkan ke lembaga adat desa di kecamatan masing-masing. Lembaga Adat Desa juga memiliki peran dan fungsi untuk membina masyarakat terutama dalam melestarikan adat dan budaya. Sehingga dengan keberadaan Lembaga Adat Desa Sinergitas Seluruh Pemangku Kepentingan di tingkat desa dalam proses penyelenggaraan, pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat khususnya di daerah kita yang di kenal dengan Tali Tigo Sapilin atau tungku Tigo Sajorangan, yaitu Pemerintah, tokoh adat dan tokoh agama akan semakin terbangun dengan baik. Lembaga adat dan pemangku adat kabupaten kuantan singingi diatur dalam Perda nomor 12 tahun 2002 tentang Pemberdayaan adat.³³

Masyarakat adat Desa Ketaping Jaya dibagi menjadi tujuh (7) suku, yaitu kotoghona, paliang soni, kampuong tonga, buki, caniago, cempandak, dan melayu. Setiap suku memiliki kepala sukunya atau ninik mamaknya masing-masing, untuk permasalahan antara sesama anggota suku maka akan diselesaikan oleh kepala suku yang bersangkutan, sedangkan untuk permasalahan yang berkaitan dengan anggota suku satu dengan anggota suku yang lain, maka akan diselesaikan oleh kepala suku- kepala suku yang bersangkutan. Kepala suku di Desa Ketaping Jaya disebut dengan Tuok

Kampung. Tuok kampung akan dibantu oleh tiga sampai empat orang yang disebut dengan ninik mamak.

Penyelesaian hukum adat Di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dilandasi oleh nilai-nilai kebersamaan, yang mengutamakan keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan. Dalam penyelesaian perkara adat (kejahatan adat), diperlukan mekanisme penyelesaian yang berbasis solidaritas, musyawarah dan mufakat. Bahkan Patrialis Akbar mengatakan, tanpa merugikan kepentingan negara dan masyarakat, hal-hal kecil harus diselesaikan terlebih dahulu untuk rekonsiliasi, dan kemudian akan ada efek hukum permanen.³⁴

Oleh karena itu, model penyelesaian yang berlaku harus mengacu pada nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Rasa keadilan terkadang ada di luar hukum, dan jelas hukum akan sulit untuk diseimbangkan. Begitu pula sebaliknya, ketika mayoritas kolektif benar-benar merasakan rasa keadilan, dan hukum itu sendiri dianggap tidak adil, maka kepastian hukum bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum itu sendiri adalah rasa keadilan, karena keadilan dan hukum bukanlah dua unsur yang terpisah.

Berdasarkan kesepakatan ninik mamak dan tokoh adat Di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, suatu perkara dapat diselesaikan melalui hukum Nasional apabila perkara tersebut telah diselesaikan melalui proses penyelesaian melalui hukum adat yang dilakukan oleh ninik mamak dan tokoh adat dan tidak menemukan kesepakatan untuk berdamai, sehingga pihak kepolisian dapat memproses perkara tersebut.³⁵

Proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui prosesi mandoa perdamaian yang digunakan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan Di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:³⁶

³² <https://kuansing.go.id/en/blog/hadiri-pengukuhan-llmb-kuansing-suhardiman-pemerintah-sangat-apresiasi.html>, diakses Pada Tanggal 22 Maret 2023.

³³ <https://kuansing.go.id/en/blog/lembaga-adat-desa-sekuntan-tengah-resmi-dikukuhkan-plt-bupati-kuansing-empat-dianggarkan-6-miliar-untuk-perangkat-adat.html>, diakses Pada Tanggal 22 Maret 2023.

³⁴ Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 85.

³⁵ Wawancara Dengan Bapak Iputra, *Kepala Desa Ketaping Jaya kecamatan Inuman*, Hari Minggu, Tanggal 4 September 2022, Bertempat di Kediaman Kepala Desa.

³⁶ Wawancara Dengan Bapak Hasrat, *Ninik Mamak Desa Ketaping Jaya kecamatan Inuman*, Hari Jum'at, Tanggal 16 September 2022, Bertempat di Kediaman Bapak Hasrat.

1. Persiapan Penyelesaian

- a. Penentuan pokok permasalahan
- b. Penentuan pihak-pihak yang ikut dalam musyawarah
- c. Penentuan waktu dan tempat

2. Pelaksanaan penyelesaian

- a. Pembukaan dari salah seorang keluarga pihak korban, kemudian diskusi atau musyawarah diserahkan langsung kepada ninik mamak dari pihak korban.
- b. Ninik mamak menjelaskan pokok permasalahan
- c. Pemaparan oleh masing-masing pihak, dimulai dari korban, pelaku, dan saksi.
- d. Penyampaian pendapat

Dalam hal ini para pihak diminta menyampaikan permasalahan atau opsi-opsinya atau penyelesaian yang ditawarkan sehingga terselesaikan permasalahan agar proses penyelesaian selalu terfokus pada persoalan tersebut. Penyampaian pendapat dimulai dari ninik mamak korban, perwakilan keluarga korban, ninik mamak pelaku, perwakilan keluarga pelaku, dan ditutup oleh penyampaian pendapat dari kepala desa.

- e. Perundingan

Perundingan berasal dari kata runding. Runding adalah perhitungan, perkiraan, pembicaraan yang sungguh-sungguh lagi mendalam tentang suatu hal. Sedangkan perundingan menurut KBBi adalah proses, cara, perbuatan berunding atau merundingkan, pembicaraan (tentang suatu hal), perembukan, permusyawaratan.³⁷

Dalam Perundingan akan tercapai kesepakatan final dari para pihak yang berperkara dalam memberikan sanksi terhadap pihak yang terbukti bersalah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kesepakatan Ninik Mamak pihak pelaku dan pihak korban, semua suku menerapkan sanksi yang sama meskipun tidak

tertulis. Bentuk sanksi yang diakui oleh masyarakat adat adalah:³⁸

- 1) Apabila tidak mengalami luka, yaitu didamaikan melalui dengan Ninik Mamak adat tanpa diberikan sanksi.
- 2) Melukai tubuh lawan yaitu seperti luka ringan, yaitu pelaku tindak pidana harus menyediakan:
 - a) Memberikan beras, ayam, dan segala keperluan untuk dimakan bersama oleh segala pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian
 - b) biaya pengobatan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Melukai berat tubuh lawan (kesalahan berat) yaitu pelaku tindak pidana harus:
 - a) melakukan pemotongan hewan seperti kambing, sapi atau kerbau sesuai kesepakatan, yang dimasak dan akan dimakan bersama oleh segala pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian
 - b) serta membayar uang sesuai kesepakatan
 - c) biaya pengobatan sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Apabila meninggal dunia, yaitu pelaku tindak pidana harus memberikan apapun yang diminta oleh pihak korban seperti sebidang tanah atau yang lainnya.

3. Akhir dari penyelesaian

Kegiatan akhir dari penyelesaian melalui hukum adat, berdasarkan kesepakatan dan kehendak dari para pihak melakukan penyelesaian melalui ninik mamak dalam pemberian sanksi yang berupa denda. Denda yang dikenakan dapat berupa penyediaan hidangan, penyembelihan hewan maupun pemberian sebidang tanah atau yang lainnya yang telah disepakati oleh pihak yang melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan pada penganiayaan.

Diakhir acara, ninik mamak akan memerintahkan untuk maaf-maafan antara pelaku dan korban, keluarga pelaku dengan keluarga korban, dan

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁸ Wawancara Dengan Bapak Khairul, *Ninik Mamak Ketaping Jaya kecamatan Inuman*, Hari Sabtu, Tanggal 17 September 2022, Bertempat di Kediaman Ninik Mamak.

semua yang hadir diacara mandoa perdamaian tersebut.³⁹

Berdasarkan hasil kuesioner dari masyarakat diketahui bahwa keseluruhan masyarakat Desa Ketaping Jaya mengatakan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui prosesi mandoa perdamaian sangat berpengaruh terhadap berkurangnya tingkat kejahatan di desa tersebut. Hal ini diketahui dari responden masyarakat yang berjumlah 50 orang atau 100% memberikan jawaban yang sama terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui prosesi mandoa perdamaian sangat berpengaruh terhadap berkurangnya tingkat kejahatan. Hal ini berdasarkan pada menurunnya tingkat kejahatan khususnya kejahatan tindak pidana penganiayaan setiap tahunnya di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman. Bahkan pada tahun 2022 ini tercatat tidak ada satupun kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

B.Pengaruh Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Prosesi Mandoa Perdamaian Terhadap Residivis dalam Mengurangi/ Mencegah Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Hukum adat pelaku yang melakukan kejahatan dalam hal ini adalah tindak pidana penganiayaan dan telah diselesaikan melalui hukum adat setempat dan mengenai sanksi untuk pelaku telah diputuskan oleh ninik mamak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pelaku/korban tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui prosesi mandoa perdamaian, pelaku yang pernah melakukan tindak pidana penganiayaan dan telah diselesaikan melalui prosesi mandoa perdamaian tidak akan mengulangi tindak kejahatan lagi.⁴⁰ Beberapa faktor yang menyebabkan

pelaku tindak pidana penganiayaan tidak melakukan kejahatan yang sama lagi, yaitu:

1. Adanya rasa malu kepada keluarga, ninik mamak, dan masyarakat sekitar untuk berbuat kejahatan lagi.⁴¹
2. Sanksi yang didapatkan pelaku yang cukup memberatkan dan apabila pelaku mengulangi kejahatan lagi maka sanksi akan menjadi lebih berat lagi.⁴²
3. Pelaku akan dikucilkan oleh tetangga dan masyarakat sekitar jika pelaku mengulangi kejahatannya lagi.
4. Akan dijadikan kambing hitam atau orang yang akan dijadikan tumpuan kesalahan atas suatu peristiwa kejahatan selanjutnya.⁴³

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui hukum adat khususnya prosesi mandoa perdamaian ini tidak bertentangan dengan hukum islam, jika bertentangan maka penyelesaian tersebut dibatalkan. Hal ini berkaitan dengan teori *reception a contrario*, yaitu hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pada dasarnya, bagi orang Islam berlaku hukum Islam dan hukum adat hanya berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan kesadaran batin dan cita-cita hukum Islam. Penyelesaian tindak pidana melalui prosesi mandoa perdamaian bukan hanya berpengaruh terhadap residivis dalam mengurangi atau mencegah tindak pidana penganiayaan tetapi juga berpengaruh terhadap perilaku pelaku yang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya rtasa bersalah kepada korban dan keluarga korban, rasa malu kepada keluarga sendiri dan masyarakat sekitar, dan pelaku takut dikucilkan oleh tetangga dan masyarakat sekitar.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui prosesi mandoa perdamaian memiliki pengaruh yang sangat baik

³⁹ Wawancara Dengan Bapak Hasrat, *Ninik Mamak Desa Ketaping Jaya kecamatan Inuman*, Hari Jum'at, Tanggal 16 September 2022, Bertempat di Kediaman Bapak Hasrat.

⁴⁰ Wawancara Dengan Santo, *Korban Tindak Pidana Penganiayaan*, Hari Sabtu, Tanggal 24 September 2022, Bertempat di Kediaman Pelaku.

⁴¹ Wawancara Dengan Darpius, *Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*, Hari Minggu, Tanggal 25 September 2022, Bertempat di Kediaman Pelaku.

⁴² Wawancara Dengan Robi, *Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*, Hari Senin, Tanggal 26 September 2022, Bertempat di Kediaman Korban.

⁴³ Wawancara Dengan Resky, *Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*, Hari Minggu, Tanggal 25 September 2022, Bertempat di Kediaman Pelaku.

⁴⁴ Wawancara Dengan Raudi, *Korban Tindak Pidana Penganiayaan*, Hari Senin, Tanggal 26 September 2022, Bertempat di Kediaman Korban.

terhadap masyarakat setempat. Hal inilah yang harus selalu dipertahankan untuk selalu terciptanya ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui prosesi mandoa perdamaian di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman sudah efektif, karena penyelesaian tersebut berdampak positif terhadap berkurangnya tingkat kejahatan di desa tersebut. Namun masih ada satu hal yang perlu ditingkatkan, seperti proses penyelesaian membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan para pihak yang terlibat khususnya ninik mamak kedua belah pihak bisa menunda waktu penyelesaian yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan alasan pribadi dan secara sepihak. Hal inilah yang membuat proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui prosesi mandoa perdamaian itu membutuhkan waktu yang cukup lama.
2. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui prosesi mandoa perdamaian sangat berpengaruh terhadap residivis dalam mengurangi atau mencegah tindak pidana penganiayaan. Selain itu penyelesaian tersebut juga berpengaruh terhadap perilaku pelaku dan masyarakat sekitar yang menjadi lebih baik dari sebelumnya dikarenakan takut akan sanksi yang didapatkan, baik itu sanksi denda maupun sanksi sosial.

B. Saran

1. Diharapkan kepada ninik mamak, kepala desa, tokoh adat dan agama Ketaping Jaya Kecamatan Inuman membuat aturan yang jelas dan tegas tentang waktu penyelesaian permasalahan agar salah satu pihak tidak bisa menunda atau membatalkan waktu penyelesaian dengan alasan apapun.⁴⁵

2. Diharapkan penyelesaian melalui hukum adat khususnya penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui prosesi mandoa perdamaian harus tetap dipertahankan disetiap permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Desa Ketaping Jaya karena sebagai bentuk menghormati untuk para Ninik Mamak, Serta pemanfaatan serta menjunjung tinggi adat, dan pihak pemerintahan yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan yang menjadi polemik masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Abidin, A.Z. Farid dan Andi Hamzah. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Amiruddin, dan Zainal asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Butarbutar, Nurhaini, Elisabeth. 2018. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danil Elwi, dan Nelwitis. 2002. *Diktat Hukum Penitensir*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerepannya*, Jakarta: Stora Grafika.⁴⁶
- Farid, A. Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Hikmawati, Fenti. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Marpaung, Leden. 2002. *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bineka Cipta.
- Morris, Alisan dan Gabrielle Maxwel. 2001. *Restorative Justice for Junvile; Coferencing. Mediation and Cirlice*, Oxford-Portland Oregeon USA: Hart Publishing.
- Najih, Mokhammad. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- _____. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Rosyadi, Rahmat dan M. Rais Ahmad. 2006. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.
- Sholehudin, Umar. 2011. *Hukum & Keadilan Masyarakat*, Malang: Setara Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- _____. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soesilo, R. 1994. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentar Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.⁴⁷
- Suarda, Widhianata, Gede. 2012. *Hukum Pidana, Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Sunardi, dan Fanny Tanuwijaya, 2011. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA.
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Thalib, Sajuti. 1985. *Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara.
- Tomalili, Rahmanuddin. 2012. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika.
- B. Jurnal/Skripsi/Tesis**
- Amdani, Yuni, 2012, “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh”, Dikutip Dari *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra-Langsa Aceh*, diakses melalui <https://www.neliti.com>.
- Dwi, Rahmi Sutanti, 2017, “Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana”, *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II Universitas Negeri Semarang*, Vol. 2, No.1, Mei.
- Ferawati dan Dasrol, 2018, “Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana pada Masyarakat Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar, Riau”, *Melayunesia Law*, Vol 2 No 2, Desember.
- Fazel S dan Wolf A, 2015, “A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice”, *PloS ONE 10(6): e0130390. doi:10.1371/journal.pone.0130390*, June.⁴⁸
- Hanafi, Arief, 2009, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan*, diakses melalui <https://media.neliti.com>.
- Ilmih, Siti, 2020, “Transaparansi Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Klasifikasi Kecil Di Kantor

Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.

Saida, Henny, 2018, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik*. No.2, Vol III, Oktober.

Satria, Hariman, 2018, “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana”, *Jurnal Media Hukum*, No. 1, Vol. 25, Juni.

Andi Hamzah. 2008. *Kamus Hukum*. Citra Umbara, Bandung.

Poerdaminto. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum adat.

D. Website

https://bphn.go.id/data/documents/draft_ruu_kuhp_final.pdf, diakses Pada Tanggal 08 Maret 2023

<https://kuansing.go.id/id/page/sejarah.html>, diakses pada tanggal 17 Juli 2022.

<https://kuansing.go.id/id/page/visi-dan-misi.html>, diakses Pada Tanggal 17 Juli 2022.

<https://kuansing.go.id/id/page/pariwisata.html>, diakses Pada Tanggal 17 Juli 2022.

<https://kuansing.go.id/en/blog/lembaga-adat-desa-se-kuantan-tengah-resmi-dikukuhkan-plt-bupati-kuansing-sempat-dianggarkan-6-miliar-untuk-perangkat-adat.html>, diakses Pada Tanggal 22 Maret 2023.

<https://kuansing.go.id/en/blog/hadiri-pengukuhan-llmb-kuansing-suhardiman-pemerintah-sangat-apresiasi.html>, diakses Pada Tanggal 22 Maret 2023.

http://repository.uin-suska.ac.id/14860/9/9.%20BAB%20IV_2018837ADN, diakses Pada Tanggal 17 Juli 2022.